UNIVERSITAS LANCANG KUNING

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

HAMDANI ARFAN
1963201129

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

HAMDANI ARFAN
1963201129

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : HAMDANI ARFAN

NIM : 1963201129

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Februari 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama	: Hamdani Arfan
NIM	: 1963201129
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul	: Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Pembimbing I	Pembimbing II
Surya Daliati,M.Si	Drs. M. Rusihardy,SH., M.Si
NIDN. 0006105804	NIDN. 1012126001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fara Merian Sari,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1012058804

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: HAMDANI ARFAN
No. Mahasiswa	: 1963201129
Jurusan	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dr. Surya Dailiati, M,Si	( )
Pembimbing	: Drs. M. Ruslyhardy,SH,M,Si	( )
Penguji	: Dr. Hernimawati, M,Si	( )
Penguji	: Sri Roserdevi Nasution,S.Sos,M,Si	( )

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 17 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr-Wb

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata – 1 pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning.

Penulis mengangkat topik sesuai pula dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik sehingga penulis tertarik memberi judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Ibu Khuriyatul Husna,S.Sos,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Ibu Harsini,S.Sos,M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Ibu Dra. Dian Rianita,MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution,S.Sos,M,Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos, M,Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

6. Ibu Dr.Hj. Surya Dailiati, M,Si sebagai Dosen dan selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. M. Ruslyhardy,SH,M,Si sebagai Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam bimbingan skripsi ini.
8. Camat Rumbai dan Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dan membantu penyempurnaan dan penyelesaian Skripsi ini dengan tepat waktu
9. Teristimewa sekali buat kedua orang tua saya dan keluarga besar yang telah mendidik dan selalu memberikan kasih saying, doa dan nasehat memberikan bantuan materil dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah dan merupakan anugerah terbesar dalam hidup ini.

Semoga Allah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah berupaya memberikan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

HAMDANI ARFAN

ABSTRAK

Nama : HAMDANI ARFAN
Nim : 1963201129
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokuMentasi. Teori yang digunakan adalah Implementasi KebijakanMenurut Edwar dalam Rian Nugroho (2014:673) dengan indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur organisasi. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin, namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat kriteria fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan fakir miskin sehingga menyebabkan program belum berjalan dengan begitu efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Fakir Miskin

ABSTRACT

Name ***: HAMDANI ARFAN***
Nim ***: 1963201129***
Title ***: Implementation of the Policy for Handling the Poor in Rumbai District, Pekanbaru City***

This research aims to determine and analyze the implementation of policies for handling the poor in Rumbai District, Pekanbaru City. The research used observation research instruments, interviews and documentation. The theory used is Policy Implementation according to Edwar in Rian Nugroho (2014: 673) with indicators of Communication, Resources, Disposition and Organizational Structure. The research results of the Implementation of the Policy for Handling the Poor in Rumbai District, Pekanbaru City have been implemented in accordance with the applicable policies and regulations in accordance with Riau Province Regional Regulation Number 17 of 2018 which also regulates the responsibilities of the Regional Government in handling the Poor, but in its implementation there are still community criteria the poor who have not received poor assistance, which causes the program to not run very effectively.

Keywords: Implementation, Policy, Poor

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS..... i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN..... ii
LEMBAR PENGESAHAN..... iii
KATA PENGANTAR..... iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah …….. 1

1.2 Perumusan Masalah ……. 11

1.3 Tujuan Penelitian 12

1.4 Kegunaan Penelitian ……. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis …… 13

2.2 Fokus Penelitian.…… 23

2.3 Kerangka Pemikiran.……. 25

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.…… 27

3.2 Metode Penelitian.……. 27

3.3 Informan Penelitian.……... 27

3.4 Jenis dan sumber data…….…… 28

3.5 Teknik pengumpulan data…….…….... 29

3.5 Analisis data…….. 30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kantor Camat Rumbai Kota pekanbaru…….. 31

4.2 Visi dan Misi Kantor Camat Rumbai……. 31

4.3 Keadaan Pegawai…….. 32

4.4 Sarana/ Prasarana 36

4.5 Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi..... 37

4.6 Struktur Organisasi.....……..... 47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru …….. 49

5.2 Hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru…….. 68

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan …….. 71

6.2 Saran ……. 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Data pendidikan pegawai……. 38

4.2 Tingkat jenis kelamin pegawai……. 39

4.3 Keadaan masa kerja pegawai…… 40

4.4 Keadaan pangkat dan golongan pegawai…….. 41

4.5 Data usia pegawai……. 42

4.6 Sarana/Prasarana .....…..... 43

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran..... 26

Bagan 4.1 Struktur Organisasi 48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa tidak terlepas dari benturan-benturan antara lain nilai dan norma sosial dengan keterbatasan kemampuan dan sumber-sumber kebutuhan yang diperebutkan. Jika nilai-nilai atau unsur kebudayaan pada suatu waktu mengalami perubahan, dimana anggota-anggota masyarakat terasa terganggu atau tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya melalui kebudayaan tadi, maka timbul gejala sosial yang meresahkan masyarakat disebut dengan masalah sosial.Masalah sosial dapat berupa kebutuhan-kebutuhan sosial maupun biologis.

Kemiskinan menurut Kuniawan (2014:38) merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan

Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin dengan asas keadilan, partisipatif, kemanfaatan, kemitraan, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Pelaksanaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi program penanganan fakir miskin di Kota Pekanbaru.

Penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa kriteria masyarakat miskin menurut Zulkifli Husin (dalam Supriatna, 2017:83) antara lain:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang,
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah,
c. Jenis dinding tempat tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Kualitas Rendah/Tembok tanpa diplester,
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah, Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
e. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung/sungai,
f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dalah kayu bakar/arang,
g. Sumber pendapatan yang rendah di bawah Rp. 600.00,- per bulan,
h. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD dan
i. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual.

Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Daerah, masalah ini merupakan urusan Pemerintah, sebagaimana yang sudah diatur dalam; dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Kemiskinan adalah permasalahan sosial

masyarakat yang terjadi memerlukan penanganan khusus dan merupakan masalah utama dan konpleks dalam pembangunan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

Kota pekanbaru memiliki beberapa Kecamatan sebagai wilayah kerja administrasi pemerintahannya. Kecamatan memiliki jumlah penduduk baik dalam rincian KK maupun jumlah secara keseluruhannya dimana terdapat jumlah penduduk yang disebut dengan fakir miskin yang mengalami kekurangan. Lebih jelasnya data fakir miskin tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1: Data Fakir Miskin per Kecamatan di Pekanbaru tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		KK	Miskin (KK)
		2023	2024		
1	Sukajadi	45.596	42.537	8.874	120
2	Pekanbaru Kota	25.637	28.674	8.873	185
3	Sail	21.935	25.812	4321	485
4	Lima Puluh	41.422	40.543	9.764	321
5	Senapelan	37.338	37.406	4.129	421
6	Rumbai	62.203	62.565	4.576	456
7	Bukit Raya	87.357	82.478	12.976	422
8	Tuah Madani	99.750	99.032	13.872	219
9	Marpoyan Damai	89.750	85.514	9.871	476
10	Tenayan Raya	95.507	92.833	7.843	120
11	Payung Sekaki	87.357	82.354	11.964	432
12	Rumbai Timur	66.139	67.223	3.375	210
13	Bina Widya	55.321	54.321	3.762	431
14	Kulim	34.875	37.432	3.391	98
15	Rumbai Barat	23.757	25.777	4.123	102

Sumber Data: Kantor BPS Kota Pekanbaru Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa data fakir miskin atau keluarga miskin yang ada di Kecamatan di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang ada di Kecamatan tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan fakir miskin. Upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warganegara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat yang berdasarkan Perturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014 tentang Program PercepatanPenanggulangan Kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungansosial. Program perlindungan sosial khususnya di Kota Pekanbaru.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Rumbai karena potensi masyarakat kecamatan rumbai yang masih banyak dibawah garis kemiskinan terutama diwilayah pesisir sehingga sangat membutuhkan program bantuan masyarakat yang berasal dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Alasan penulis melakukan penelitian mengenai program penanganan fakir miskin karena program ini diharapkan seperti program bantuan pangan dan papan dapat membantu masyarakat karena tanggung jawab dalam menanggulangi masalah sosial tersebut yang jika tidak cepat ditangani maka akan menjadi masalah sosial besar serius yang akan berdampak negatif kedepannya seperti akan timbulnya kejahatan pencurian yang akan mengganggu ketertiban umum yang ada di Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan program penanganan fakir miskin tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pengawasan dengan melakukan koordinasi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang memiliki tugas pokok melakukan monitoring dan pengawasan serta evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atas program penanganan fakir miskin yang ada tersebut, dengan waktu pengawasan diawal kegiatan dan diakhir penyelesaian kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan. lebih jelasnya dapat dilihat alur bagan dibawah ini:

Bagan I.1 Alur Koordinasi dan Pengawasan

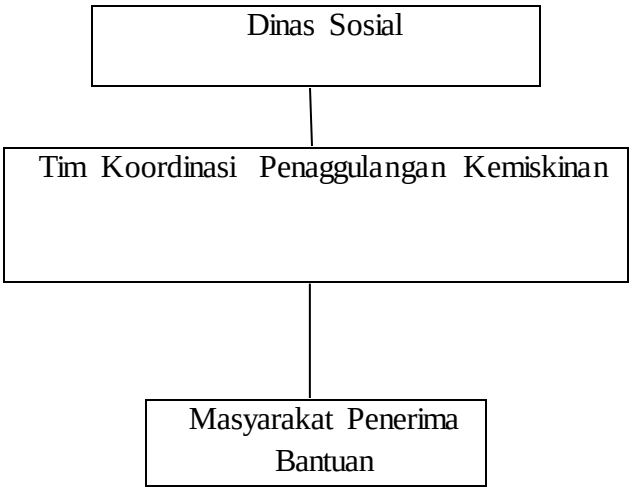

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

Dari alur bagan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme dalam pemberian bantuan kepada fakir miskin yang ada di kecamatan rumbai kota pekanbaru dengan Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pekanbaru untuk menyelaraskan pelaksanaan pembinaan bantuan kepada masyarakat fakir miskin khususnya di Kecamatan Rumbai, waaupun

dalam perjalannya masih ada beberapa kendala pada pelaksanaan program yang kurang diawasi sehingga menyebabkan salah sasaran dan prosedur yang tidak dijalankan dengan baik.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 yang disebut fakir miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pehencarian dan/atau mempunyai sumber mata pehencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan Fakir Miskin didalam Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin.

Dalam pasal 33 disebutkan bahwa Penanganan fakir miskin merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap PMKS yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian dipasal 34 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung-jawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, maka penanganan fakir miskin ditujukan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalampengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Kemudian pada pasal 35 Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
d. pelayanan sosial;
e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha

Masyarakat miskin Kota Pekanbaru setiap harinya memiliki penghasilan yang rendah dan penghasilannya tersebut hanya cukup untuk makan sehari saja sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang membuat mereka terpaksa beristirahat didepan toko-toko setelah lelah bekerja seharian. Untuk melihat

jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Rumbai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2: Data Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah KK	Miskin (KK)
1	Meranti Pandak	1.185	98
2	Lembah Damai	954	72
3	Limbungan Baru	875	88
4	Sri Meranti	279	120
5	Palas	107	43
6	Umban Sari	1.176	35
Jumlah		4.576	456

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk atau fakir miskin yang ada di Kecamatan Rumbai paling banyak ada dikelurahan meranti pandak sebesar 1.185 KK dengan jumlah KK miskin sebanyak 98 KK. Masyarakat miskin Kota Pekanbaru khusunya di Kecamatan Rumbai tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja serabutan dan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari saja sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Lebih jelasnya data pekerjaan masyarakat di Kecamatan Rumbai data dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3 Data pekerjaan masyarakat di Kecamatan Rumbai Tahun 2024

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5.672
2	Pedagang	8.742
3	Petani/kebun	22.876
4	Wiraswasta	10.876
5	Tidak memiliki pekerjaan tetap	30.876

Sumber Data: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat di Kecamatan Rumbai yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan paling tinggi diantara lainnya sehingga dalam hal ini mereka memerlukan perhatian dan bantuan yang harus diberikan oleh pemerintah. Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan bantuan sosial kepada masyarakat telah melaksanakan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan program kerja yang ada. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait yang saling terlibat. Untuk mengetahui program kerja bidang bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 Program Kerja Dinas Sosial Pekanbaru tahun 2024 dalam penanganan fakir miskin di Kecamatan rumbai Kota Pekanbaru

NO	Program	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar(pangan)	100,00	57.00
2	Program Penyelenggaraan Penanggulangan kemiskinan dengan intansi terkait.	100,00	72,00
3	Program penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	100,00	81,00

Sumber data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel diatas dilihat bahwa target kerja tahunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana masih ada target kerja yang belum terlaksana yakni pada program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana/Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar(pangan) dengan pencapaian target sebesar 57,00 , ini disebabkan masih adanya program pencegahan kesiapsiagaan, program

bantuan sosial untuk fakir miskin kurang terlaksana oleh Dinas Sosial KotaPekanbaru.

Dalam pemberian penanganan bencana, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada masyarakat fakir miskin khususnya yang ada di Kecamatan Rumbai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.5 : Data penanganan fakir miskin di Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah fakir miskin	Data Fakir Miskin dibantu	Data Fakir Miskin belum dibantu	Bentuk bantuan	Jumblah anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	2021	456	120	336	Sandang dan Makanan dan obat-obatan	750.000.000,00	APBD
2	2022	456	120	336	Sandang dan Makanan serta perbaikan rumah	650.000.000,00	APBD
3	2023	456	120	336	Sandang dan makanan serta obat-obatan	550.000.000,00	APBD
4	2024	456	120	336	Sandang dan makanan serta obat-obatan	600.000.000,00	APBD

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial KotaPekanbaru dengan memberikan bantuan seoptimal mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemberian bantuan diberikan dalam bentuk sandang maupun makanan,untuk bantuan sandang diberikan dalam bentuk perbaikan rumah para korban yang terkena bencana dan memberikan pakaian sedangkan untuk bantuan dalam bentuk pemakanan diberikan dalam bentuk sembako, obat-obatan dan kebutuhan makanan lainnya yang diperlukan dalam kurun waktu dari tahun 2020-2023

Berdasarkan hasil pra survey lapangan penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena mengenai masalah program penanganan fakir miskin yang diantaranya:

1. Masih adanya fakir miskin yang belum memperoleh bantuan yang diberikan pemerintah sesuai dengan jumlah data fakir miskin yang ada di Kecamatan Rumbai seperti terlihat pada tabel I.5 diatas.
2. Pelaksanaan program penanganan fakir miskin di kecamatan rumbai belum berjalan dengan optimal terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel I.4 diatas.

Dari gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru"**.

I.2. Perumusan Masalah

Program bantuan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria fakir miskin sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga kehidupan mereka lebih baik lagi dari berbagai aspek bidang kehidupan. Maka harapan dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada fakir miskin di kecamatan tersebut tersebut dapat mengurangi beban hdup mereka serta memberikan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh dan program dapat dilaksanakan secara komperehensif tentunta berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?”.
2. Apa saja hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?”.

I.3 Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

I.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Sebagai informasi bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
b. Sebagai informasi bagi pihak lain serta referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam di Kecamatan Rumbai dan Instansi terkait dalam mendukung seluruh kebijakan penanganan fakir miskin yang ada di Kecamatan dan Kota Pekanbaru secara umumnya.
c. Bagi penulis penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah terutama Ilmu Administrasi Negara.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka akan dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

1. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin,Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan program fakir miskin dan sudah diberikan sosialisasi dna udangan kepada masyarakat serta pembagian kartu dan pemerintah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan penyerahan sembako dan kartu secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya dikecamatan tersebut. namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat kriteria fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan fakir miskin sehingga menyebabkan program belum berjalan dengan begitu efektif.
2. Adapun hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah:
   - Data masyarakat yang tidak lengkap.
   - Anggaran program bantuan yang belum cukup memadai

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Menyarankan Agar masyarakat penerima bantuan miskin menyiapkan seluruh data kependudukannya yakni baik KK maupun KTP karena berperan penting dalam mendukung seluruh proses verifikasi bantuan oleh pendamping dan berkoordinasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan apabila terjadi kehilangan dokumen kependudukan tersebut agar dilakukan pengurusan dengan cepat dan tepat.
b. Agar Pemerintah menyiapkan anggaran baik penambahan dalam Draf APBD dan APBN melalui mekanisme pengajuan usulan kepada instansi terkait sehingga anggaran yang dibutuhkan kedepannnya dalam keterlaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin di kecamatan Rumbai dan dapat mengoptimalkan data yang akurat sesuai kondisi dilapangan sehingga pembagian bantuan yang dimaksud dapat diterima oleh seluruh masyarakat miskin yang ada.

\

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, 2017 Kinerja Pelayanan Publik. Bumi Pustaka. Jakarta

George, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas).*PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Ibrahim, Amin. 2011. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.

Lester, 2016. *Public Policy,* Jakarta. Gralia Indonesia.

Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi.* Bumi Aksara. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang penanganan fakir miskin.

Priansa, Doni. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional.* Alfabeta. Bandung..

Rian Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik*. .PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siagian.SP 2012. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi).* PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Siagian.SP 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi).* PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sopiah 2013. *Pengantar Manajemen.*PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Suharno. 2012. *Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Surachman. 2016. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.

Syafi'i, Inu Kencana. 2011. *Sistem Admnistrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*.PT. Bumi Akasara. Jakarta.

Winarmo Budi . 2011. *Kebijakan Publik* PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Jurnal

Indah Aulia, 2021. Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tapung Hilir). Jurnal Fsipol Vo. 05 No. 03

Herniyati, 2022. Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Bengkalis.Jurnal Ilmiah Muqadimah, Vol 6 No. 2

Rudi Kurniawan, 2019 yang berjudul Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Humanis. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional